

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal.2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.
- Aris. 2019. Terjawab Presiden Tanda Tangani Wali Kota Batam Sebagai Ex-officio Kepala BP Batam selengkapnya di <https://batampos.co.id/2019/09/16/terjawab-presiden-tanda-tangani-wali-kota-batam-sebagai-ex-officio-kepala-bp-batam/> Diakses pada 22 September 2022 pukul 00.04
- Budiardjo, Miriam. 2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Batampos. Menakar Perjalanan *ex-officio* Batam :solusi atau Ambiguitas Pemko dan BP Batam
- Badan Pengusahaan Batam.2022. Profil Badan Pengusahaan Batam selengkapnya di <https://bpbatam.go.id/general> pada 21/09/2022 pukul 21.00 WIB
- Charity,May Lim. 2018. Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (*irony practices of the double duty in the Indonesian state system*). *Jurnal legislasi indonesia*. Vol 13(1) Hal 8-11
- Creswell, John W. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Faizin, Zainal.2021. Penerapan Hak *Ex-Officio* Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif. *Thesis institute agama islam negeri*.
- Harjono,Dhaniswara K..2022.*Aspek Hukum Rangkap Jabatan*. Jakarta: Uki Presss
- Irawan, Tesar Adi. 2019. Dualisme Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (Study Pada Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Bandar Lampung). *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung*.. Hlm 52-55
- Januarius, Fabian. 2018. Gregetan jokowi bubarkan BP Batam selengkapnya di (<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/12/20011091/gregetan-jokowi-bubarkan-bp-batam>) diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 02.20 WIB
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. BP Batam Dipimpin Walikota, Solusi Dualisme di Batam. selengkapnya di

(<https://ekon.go.id/publikasi/detail/1555/bp-batam-dipimpin-walikota-solusi-dualisme-di-batam>) diakses pada 23 november 2022 pukul 20.13

Kepriraya.com. 2022. Kasus Agraria Di Kepri Masih Menonjol Dilaporkan Ke Ombudsman selengkapnya di <http://kepriraya.com/2022/07/15/kasus-agraria-di-kepri-paling-menonjol-dilaporkan-ke-ombudsman/> diakses pada 1 Desember 2022 pukul 00.06

Lhaura, Lucky dkk. 2022. Politisi Senat Akademik dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan Dan Perilaku Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Antikorupsi*. Vol 7(2) Hlm 387-388

Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Tanjung, Tjahjo Arianto dan Eko Budi Wahyono. 2019. Permasalahan Penguasaan Tanah Perkampungan Tua Kota Batam. *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Kota Batam tahun 2019*, hal 272 selengkapnya di <http://repository.stpn.ac.id/232/1/18%20Permasalahan%20Penguasaan%20Tanah%20Perkampungan.pdf>

Ombudsman RI. 2022. Kasus Agrarian Di Kepri Paling Menonjol Dilaporkan Ke Ombudsman. Selengkapnya di (<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--kasus-agraria-di-kepri-paling-menonjol-dilaporkan-ke-ombudsman>) diakses pada 24 November 2022 pukul 02.34

Ombudsman Republik Indonesia. 2020. Bahaya Rangkap Jabatan Pejabat BUMN di era Jokowi dan Erick Thohir. Selengkapnya di <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/bahaya-rangkap-jabatan-pejabat-bumn-di-era-jokowi-dan-erick-thohir-> pada 10 November 2022.

Oktahade, Satria. 2018. "Dinamika Kekuasaan Di Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam: Keterlibatan Aktor Politik Dalam Konflik Kewenangan Antara BP Batam Dengan Pemko Batam". *Skripsi Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas*.

Paramita, Ghita. dkk. 2021 "Peran Aktor Lokal Dalam Formulasi Kebijakan *Ex-officio* di Kota Batam." *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol 10(2) hal 6-7

Rahman, Azura Adawiyah, Rusli dan Andi Lukman . 2021. Analisis Regulasi Kewenangan Bidang Pertanahan di Kota Batam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 14 (1)

- Sjaroida, Diah Fatma & Rully Khairul Anwar. 2017. Urgensi Unsur Elit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Di Jawa Barat. *Jurnal Wacana Politik*. Vol 2(2) hlm 129.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Metode Analisis Data Kualitatif*. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pertama Pustaka Ramadhan.
- Suci, Afred., dkk. 2020. "Dilema Ex-Officio Terkait Pencegahan Korupsi Dan Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Swasta". *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol 6(1). Hal 6-7
- Sugeno, Dendy. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suriasumantri, Jujun . 1988. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.66
- Sandi, Krisnanda Maya. 2018. Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan di Partai Politik. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Simanjuntak, Kardin M. 2015. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. Vol 7(2) hlm 114
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia hlm. 57
- Tribunbatam.id. 2013. Sengketa Lahan Tanjung Uma Memanas selengkapnya di (<https://batam.tribunnews.com/2013/10/21/sengketa-lahan-tanjung-uma>) memanas diakses pada 25 Februari 2023 pukul 01.25
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 18 ayat 1 tahun 1965 Tentang Pokok Pokok Pemerintah Daerah
- Wibawa, Samodra 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada